

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada tahun 2026 (Triwulan I) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen untuk tetap menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Disamping itu TPID harus mampu mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal di daerah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas di daerah. Kewajiban utama Pemerintah Daerah melalui TPID adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman dan bermutu, sepanjang tahun serta dapat menerapkan kebijakan yang tepat dalam upaya pengendalian dan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat di daerah.

Alhamdulillah pada tahun 2025 yang lalu Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih TPID Award sebagai Kabupaten dengan Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Hal ini menjadi pendorong untuk melaksanakan program kerja pengendalian inflasi dan berupaya meningkat berbagai inovasi kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah yang ada terutama dibidang pertanian.

Sebagai daerah penghasil utama komoditas pertanian di NTB, posisi Kabupaten Lombok Timur memiliki peran yang vital dan strategis. Kalau terjadi gangguan atau penurunan produksi pertanian, akan mengakibatkan terganggunya pasokan komoditas pertanian di NTB yang tentunya akan mempengaruhi tingkat inflasi daerah. Ada 2 (dua) komoditas pertanian yang sering menjadi pemicu inflasi yaitu beras dan cabai (meskipun Lombok Timur tercatat sebagai Champion Cabai dan Padi). Tantangan utama kedua komoditas ini sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Oleh karena itu inovasi pengendalian inflasi kabupaten Lombok Timur difokuskan pada upaya dan solusi menyiasati perubahan musim.

Pada Triwulan I 2026 ini (Januari s.d Maret) kita juga akan menghadapi Perayaan Hari Besar Keagamaan yaitu Bulan Suci Ramadhon dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H yang tentunya akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga diperlukan upaya-upaya ekstra untuk dapat menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat.

Kedua kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi TPID karena disetiap awal musim penghujan bahan pokok utama pada musim kemarau seperti cabai rawit, bawang merah, tomat sayur dan aneka tanaman hortikultura lainnya sudah mengalami akhir produksi dan digantikan dengan tanaman musim penghujan berupa padi. Dimana dalam setiap pergantian musim ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terjadi gangguan pasokan yang menimbulkan kenaikan harga terutama pada cabai, bawang merah dan beras.

Begitu juga halnya pada saat Ramadhon, terjadi peningkatan konsumsi pada bahan pokok terutama daging ayam, telur dan aneka sayuran terutama cabai, tomat, bawang merah dan kangkung.

Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Tim TPID sedini mungkin menyiapkan strategi untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok agar terjamin ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga yang akan mengakibatkan tekanan pada tingkat IPH dan Inflasi di Daerah.

Berdasarkan hasil dari pemantauan berkala harga Bahan Kebutuhan Pokok yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada Triwulan I Tahun 2026 ini, dijadikan sebagai input untuk perhitungan IPH sebagai proxy inflasi di daerah Non IHK. Dari hasil pemantauan harga awal tahun atau Triwulan I tahun 2026 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur Triwulan I 2026

Januari				Februari				Maret		
M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3
(0.47)	(1.57)	(2.91)	(4.03)	7.90	7.30	9.88	10.54	6.22	2.51	2.51

Tingkat Inflasi NTB dan Kota Mataram (Year to Date)

	Jan	Feb	Mar
NTB	0.27	0.96	1.93
Kota Mataram	(0.27)	1.12	0.85

Dari Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) tersebut diatas IPH tertinggi di Kabupaten Lombok Timur terjadi pada minggu IV bulan Februari 2026 sebesar 10,54 dan terendah pada Minggu IV bulan Januari sebesar -4,03.

Sedangkan Data inflasi yang terjadi di Kota Mataram dan inflasi gabungan Propinsi NTB juga mengalami kondisi hampir sama dimana inflasi Propinsi NTB berada posisi yang rendah pada bulan Januari (3.86) kemudian naik pada bulan Februari (5.37) melandai pada bulan Maret (4.09), begitu pula halnya dengan Kota Mataram inflasi pada bulan Januari cukup rendah (3.69) meningkat pada bulan Februari (5.49) melandai lagi di bulan Maret (3.98). Data inflasi Propinsi dan Kota Mataram identik dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur Rendah di bulan Januari, naik di Bulan Februari dan melandai ri bulan Maret.

Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga yang cukup tinggi seiring dengan terjadinya ganggunya pasokan akibat perubahan musim dan meningkatnya kebutuhan pangan pada saat Hari Besar Keagamaan (HBKN) puasa dan Lebaran, saling mempengaruhi antara IPH Lombok Timur dengan tingkat inflasi.

Adapun komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur dan inflasi di NTB yaitu :

- Cabai Rawit
- Cabai Merah
- Daging Sapi

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kenaikan harga komoditas cabai merah, cabai rawit dan daging sapi.

Setiap pergantian musim tanam kedua jenis komoditas ini yaitu cabai rawit dan cabai mengalami gangguan produksi karena pergantian jenis tanaman dari cabai ke tanaman padi.

Sedangkan daging sapi tidak terlalu tinggi kenaikan harganya hanya terkoreksi akibat banyaknya permintaan pada saat Ramadhan dan Lebaran.

2. Keterbatasan Anggaran

Dengan adanya pengetatan anggaran khususnya yang bersumber dari APBD mengakibatkan turunnya kuota untuk intervensi terutama subsidi untuk ongkos angkut dan selisih harga untuk operasi pasar khususnya cabai rawit. Selain ini belum siapnya penganggaran karena awal tahun anggaran dimana realisasi untuk anggaran operasi pasar ini tersedia.

3. Terjadinya pola konsumsi nasional dan daerah yang hampir sejenis sehingga daerah penghasil yang memiliki kelebihan komoditas sangat terbatas kemampuannya untuk memasok ke daerah lain walaupun sudah terikat dalam kerjasama antar daerah (KAD).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Penguatan Produktivitas Pertanian terutama Padi dan Cabai melalui para Champion (Champion Padi dan Cabai)
2. Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani dan Peternakan serta menyiapkan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan.
3. Kegiatan Rutin Penanganan Inflasi oleh TPID : (Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten; Penyusunan Neraca Pangan Periodik di Kabupaten Lombok Timur; Operasi Pasar Murah; Sidak Pasar dan Menggalakkan penanaman berbagai jenis kebutuhan pokok di halaman sendiri terutama cabai dan sayur-mayur dengan penediaan bantuan polybag dan bibit tanaman oleh dinas pertanian; serta Komunikasi dan Koordinasi Kerjasama antar daerah dalam penanganan inflasi)
4. Membangun komitmen melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah terjalin dengan beberapa Kabupaten Penghasil yang ada di wilayah Propinsi maupun dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi lainnya.
5. Menyiapkan biaya tidak terduga (BTT) untuk subsidi biaya angkut, penggantian selisih harga dan onkos buruh pada saat operasi pasar dengan pola penjualan dibawah harga pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kebijakan yang telah ditetapkan cukup efektif dalam upaya penanganan pengendalian harga di daerah utamanya untuk penanganan jangka pendek, sangat diperlukan upaya penanganan jangka panjang seperti penggeseran pola konsumsi tidak hanya bergantung bahan segar saja tetapi beralih kepada bahan olahan/kering dan mengoptimalkan bahan pangan lokal.
2. Menggalakkan pola makan hemat dengan berusaha menghabiskan makanan yang dikonsumsi dan jangan sampai terbuang percuma, serta menggalakan bijak berbelanja dan tidak menimbun makanan yang tidak dibutuhkan.
3. Konsistensi pemerintah daerah dalam penyiapan anggaran inflasi sehingga semua program kegiatan dapat berjalan optimal.
4. Melibatkan pihak swasta dalam penguatan pasokan komoditas yang masih kurang di daerah dengan memberikan beberapa fasilitasi terutama kemudahan permodalan dan perijinan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dukungan dan fasilitasi kepada para champion dalam rangka operasi pasar, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat waktu dan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sampai ke pelosok desa;
2. Menyiapkan anggaran lebih awal untuk memasok komoditas yang produksinya kurang di daerah, terutama komoditas yang harganya melonjak, sehingga cepat bisa ditanggulangi;
3. Menjalin komunikasi dengan daerah penghasil dalam kerangka kerjasama antar daerah (KAD) dengan melibatkan swasta lokal sebagai distributor yang akan memperkuat pasokan kebutuhan pangan di daerah.